



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNAWAN CATUR PRASETYO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 716521

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 640 m²/320 m² di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/54 m² di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/54 m² di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 126.200.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 106.500.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.387.345**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 136.489.195**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.095.076.540

III. HUTANG Rp. 100.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 995.076.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.